



SKRIPSI

IMPLEMENTASI AUDIT OPERASIONAL OLEH *INTERNAL CONTROL* TERHADAP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) *BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH* (BTM) SUMATERA BARAT

OLEH

NAMA : PUTRI YENI
NIM : 21080034
PRODI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025

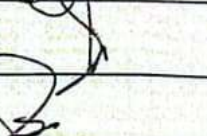
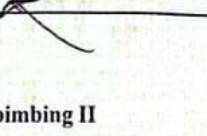
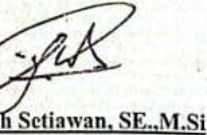
PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 23 Agustus 2025

Judul : Implementasi Audit Operasional oleh *Internal Control* Terhadap Bagian Administrasi Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Sumatera Barat

Nama : Putri Yeni
Nim : 21080034
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

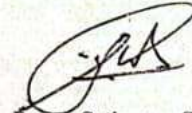
No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fitri Yulianis, SE.,M.Si	Ketua	
2	Puguh Setiawan, SE.,M.Si	Anggota	
3	Rina Widyanti, SE.,M.Si	Anggota	
4	Immu Puteri Sari, SE.,M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Fitri Yulianis, SE., M.Si
NIDN : 1027058001

Pembimbing II


Puguh Setiawan, SE.,M.Si
NIDN : 1007017302

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi


Immu Puteri Sari, SE.,M.Si
NIDN : 1019098502

Ketua Prodi Akuntansi


Rina Widyanti, SE.,M.Si
NIDN : 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Yeni

NIM : 21080034

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan



Putri Yeni
21080024

HAK CIPTA

Hak cipta milik PUTRI YENI tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbayak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau Keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan Dalam rangka memenuhi satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan , bantuan serta doa dari berbagai pihak.. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

1. Pertama-tama, penghormatan yang tulus dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayah Penulis yaitu ALM Budi Iskandar dan ibu Penulis yaitu Desmayeni, yang dengan cinta kasih, doa yang tiada henti, serta pengorbanan tanpa batas telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya peran dan pengaruh mereka dalam mengantarkan penulis sampai ke titik ini.
2. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan semangat yang tak ternilai sepanjang perjalanan pendidikan ini.
3. Penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Fitri Yuliansi SE,M.Si, dan Bapak Puguh Setiawan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi yang membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Bimbingan Ibu dan Bapak telah menjadi sumber motivasi, semangat, dan pencerahan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan penelitian ini.

4. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Widyanti, SE, M.Si dan Ibu Immu Puteri Sari, SE, M.Si selaku dosen penguji penulis yang telah meluangkan waktu untuk menilai, mengevaluasi, serta memberikan arahan demi kesempurnaan penelitian ini.
5. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, terutama dosen Program Akuntansi atas ilmu dedikasi dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi.
6. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Penulis Ucapkan terima kasih kepada teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Akuntansi, yang telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis dan memberikan pengalaman berharga selama masa-masa perkuliahan.
8. Penulis ucapkan terimakasih kepada Teman-teman peulis yaitu “Kapak Gengs” yang telah memberikan dukungan dan menjadi kekuatan disaat penulis ingin menyerah.

9. Penulis ucapkan terimakasih kepada Yustika Fitri yang telah membantu penulis dan menjadi sumber kekuatan penulis disaat penulis hilang arah dan ragu dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Penulis ucapkan terima kasih kepada Tesa Depina Amelia yang telah mendukung dan Bersama-bersama mengajak penulis dalam bimbingan dan menemani penulis dalam penelitian.
11. Penulis ucapkan terima kasih kepada khairatul isra yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Terakhir untuk diri sendiri Putri Yeni . Terima kasih telah bertahan di saat rasa lelah mulai menguasai, ketika pikiran mulai dipenuhi keraguan, namun tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan ini, Terima kasih telah berani memulai meskipun tidak tahu seperti apa akhir dari perjalanan ini, dan meskipun sering dihadapkan pada kebingungan, tetap mau belajar dan mencoba, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah.

Semoga rasa syukur ini menjadi pengingat bahwa penulis pernah berjuang sekuat tenaga untuk sampai di titik ini, dan semoga di masa depan, ketika tantangan kembali datang, penulis dapat melihat kembali kata-kata ini sebagai sumber kekuatan.

Padang, Agustus 2025

Putri Yeni

**IMPLEMENTASI AUDIT OPERASIONAL OLEH *INTERNAL CONTROL*
TERHADAP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

PUTRI YENI

Nim: 21080034

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: putriyeni2004@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi audit operasional yang dilakukan oleh *internal control* terhadap bagian administrasi pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat.. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengendalian internal dalam mengurangi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas administrasi pembiayaan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kesalahan maupun penyimpangan. Audit operasional dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan operasional guna mendukung pencapaian tujuan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *internal control* di KSPPS BTM telah menjalankan audit operasional dengan tahapan yang sistematis, meliputi audit pendahuluan, pengujian pengendalian manajemen, audit terinci, dan pelaporan. Audit ini mampu mengidentifikasi berbagai risiko dan kesalahan administrasi dalam proses pembiayaan. Dengan adanya pelaksanaan audit operasional yang efektif, KSPPS BTM dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terhadap kinerja bagian administrasi pembiayaan.

Kata Kunci: Audit Operasional, *Internal Control*, Administrasi Pembiayaan, KSPPS BTM, Risiko Operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Implementation of Operational Audit by Internal Control on the Financing Administration Department at the Sharia Savings and Loans Cooperative Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) of West Sumatra

PUTRI YENI

Nim: 21080034

Accounting study Program, University Of Muhammadiyah West Sumatra

Email: putriyeni2004@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of operational audits conducted by internal control on the financing administration department at the Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) of West Sumatra. The background of this research is based on the importance of internal control in minimizing potential risks arising from financing administration activities, which are highly vulnerable to errors and irregularities. Operational audits are conducted to assess the efficiency, effectiveness, and compliance of operations in order to support the achievement of the institution's goals. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the internal control function at KSPPS BTM has implemented operational audits in a systematic manner, covering preliminary audits, management control testing, detailed audits, and reporting. This audit has proven effective in identifying various risks and administrative errors in the financing process. With effective implementation of operational audits, KSPPS BTM has improved accountability, transparency, and supported management in making more accurate decisions regarding the performance of the financing administration department.

Keywords: Operational Audit, Internal Control, Financing Administration, KSPPS BTM, Risk Management

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Audit	8
2.1.1 Data dan fakta	10
2.1.2 Jenis-jenis audit	11
2.1.3 Jenis-jenis Auditor Audit	13
2.2 Audit Operasional	14
2.2.1 Pengertian Audit Operasional	14
2.2.2 Tujuan Audit Operasional	15
2.2.3 Unsur-unsur audit operasional	17
2.2.4 Jenis-jenis Audit Operasional	18
2.2.5 Tahap-Tahap Audit Operasional	19
2.2.6 Pelaksana Audit Operasional	23
2.2.7 Kualifikasi Auditor	23
2.2.8 Hal-hal yang Membatasi Audit Operasional	25
2.3 Manajemen Risiko Operasional	25
2.3.1 Pengertian Risiko	25
2.3.2 Tujuan Manajemen Risiko	27
2.3.3 Penyebab Risiko	28
2.4 Internal control	30
2.5 Adminitrasi Pembiayaan	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2.6	KSPPS <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i> (BTM).....	32
2.7	Penelitian Terdahulu	33
2.8	Kerangka Pemikiran.....	35
	BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2	Jenis Data dan Sumber Data	36
3.2.1.	Jenis Data	36
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	37
3.3	Teknik Analisis Data.....	39
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Gambaran umum <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i> (BTM)	41
4.1.2	Struktur Organisasi dan Peran <i>Internal Control</i> KSPPS BTM.....	47
4.1.3	Fungsi Bagian Administrasi Pembiayaan KSPPS BTM.....	60
4.2	Pelaksanaan Audit Operasional Oleh <i>Internal Control</i>	69
4.2.1	Audit Bidang Pembiayaan	69
4.2.2	Landasan Ketentuan Audit Operasional Pembiayaan.....	70
4.2.3	Program Kerja Internal Control KSPPS <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i>	72
4.2.4	Prosedur dan Tata Cara Audit Operasional	75
4.2.5	Pelaksanaan Audit Operasional oleh <i>Internal Control</i> terhadap pembiayaan di KSPPS BTM.....	78
4.2.6	Audit Syariah atas Pembiayaan	79
4.3	Pengendalian risiko terhadap administrasi pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i>	82
4.4	Peran Internal Control Terhadap Administrasi Pembiayaan.....	85
	BAB V PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Personalia KPPS BTM.....	48
Tabel 4.2 Struktur Pengurus KPPS BTM.....	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Struktur KPPS BTM.....	46
Gambar 4.2 Proses Pengajuan Permohonan Pembiayaan.....	63
Gambar 4.3 Proses Usulan <i>Account Officer</i>	66
Gambar 4.4 Proses Pelaksanaan Audit Syariah.....	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggangdakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara	94
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	99
Lampiran 3 Surat Keputusan Pengurus KSPPS BTM Sumatera Barat.....	100



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia didorong oleh rasa keprihatinan yang begitu besar (Andri, 2021). Banyaknya masyarakat miskin yang semakin terjerat oleh para rentenir dalam rangka mendapatkan modal untuk pengembangan usaha, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak bisa berhubungan langsung dengan lembaga keuangan sementara usahanya tergolong dalam usaha kecil dan mikro. Masyarakat juga berpikir bahwa jika berhubungan langsung dengan lembaga keuangan prosesnya akan rumit dan lebih memilih rentenir yang tergolong mudah walaupun dengan bunga yang sangat tinggi.

Berawal dari permasalahan – permasalahan tersebut pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Tamwil Muhammadiyah* pada saat itu nama awalnya adalah *Baitul Maal Wal Tamwil* (BTM) dan sekarang Namanya berganti menjadi KSPPS BTM yang memiliki target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha kecil mikro. KSPPS BTM sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Didirikannya KSPPS BTM bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, masyarakat dan mencegah dari peminjaman kepada rentenir atau melepaskan ketergantungan pada rentenir. Melalui lembaga KSPPS BTM, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan system riba (bunga) dan mengalihkannya pada sistem ekonomi islam yang disebut bagi hasil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KSPPS BTM merupakan lembaga keuangan yang memberikan salah satu solusi bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Bagian pembiayaan merupakan salah satu elemen utama dalam operasional di KSPPS BTM. Fungsi pembiayaan tidak hanya berperan dalam memberikan modal kepada anggota atau nasabah, tetapi juga dapat memastikan keberlanjutan usaha anggota, keseimbangan risiko, dan kelangsungan finansial KSPPS BTM dalam mewujudkan misi-misi sosial-ekonomi lembaga. Dengan pengelolaan yang baik, bagian pembiayaan tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional tetapi juga memperkuat dampak positifnya terhadap masyarakat.

Pada bagian administrasi pembiayaan, penyaluran dana kepada masyarakat atau pembiayaan merupakan satu alur rangkaian proses. Tahapan proses itu terdiri dari pengenalan nasabah, melakukan permohonan, melengkapi data, melakukan survey, selanjutnya dilakukann proses pencairan dilengkapi dengan akad antara mitra yang mengajukan pembiayaan (Archadiwa, 2020).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, terdapat pada pasal 92 poin 01 BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank pengkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat

syariah. Untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu memastikan dan juga meningkatkan kegiatan operasional bank berjalan dengan baik sekaligus perbaikan atas segala kekurangan, yang ditentukan dalam rangka menunjukkan efektifitas dan efisiensi usaha yang dilakukan. Untuk itu perlu adanya alat untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan yaitu Audit Operasional.

Audit Operasional merupakan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perbankan, baik terhadap bagian atau fungsi unit kerja maupun terhadap prosedur pekerjaan, guna evaluasi unit kerja baik rencana kerja, pencapaian tujuan organisasi, serta peningkatan manfaat atas semua sumber daya perusahaan. Audit operasional merupakan salah satu alat pengendalian manajemen agar kegiatan operasional berjalan lebih efisien, hemat dan produktifitas. Selain itu audit operasional bertujuan memberikan rekomendasi yang konstruktif dan terarah terhadap pengelolaan aktivitas ke arah perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Melalui pembiayaan usaha, audit operasional dilakukan oleh *internal control*. Dalam struktur organisasi cabang *internal control* merupakan fungsi yang independen yang memiliki wewenang untuk melakukan audit operasional baik di kantor cabang utama maupun di kantor pusat.

Berdasarkan penelitian Novriani (2014) dijelaskan bahwa audit operasional bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Audit operasional dilakukan satu kali dalam setahun. Sebelum melakukan pemeriksaan auditor internal menerima surat penugasan untuk penelitian pendahuluan dan

memberikan surat pemberitahuan kepada unit kerja yang diperiksa. Dalam menjalankan aktivitas perbankan tentunya dihadapkan pada berbagai risiko. Menurut Wibowo (2022) risiko adalah kesempatan atau terkena bahaya. Dalam konteks ini, risiko digunakan untuk menandakan konsekuensi *negative*. Namun, mengambil risiko juga dapat menghasilkan hasil yang positif. kemungkinan ketiganya adalah bahwa risiko terkait dengan ketidakpastian hasil.

Jenis risiko yang terdapat pada fungsi administrasi pembiayaan meliputi risiko yang timbul disebabkan kekeliruan dalam melakukan transaksi, kesalahan pengimputan nomor perkiraan, kesalahan dalam keabsahan dan kelengkapan transaksi. Adapun risiko lain muncul pada fungsi administrasi pembiayaan adalah risiko reputasi bank. risiko reputasi bank adalah risiko yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam bertransaksi sehingga nominal pembiayaan yang dijanjikan kepada nasabah tidak sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan reputasi bank sebagai lembaga yang dipercaya tidak dapat terpenuhi. Risiko lain yang dapat terjadi adalah risiko kepatuhan, yaitu risiko yang terjadi apabila fungsi tersebut tidak patuh dalam membukukan dengan baik dan benar pengembalian pinjaman nasabah, terutama pengembalian pokok utang. Selain itu fungsi ini juga di tuntut untuk melakukan pembukuan dengan baik dan benar atas pendapatan yang di terima oleh bank yang berasal dari pembiayaan yang di berikan.

Dengan banyaknya risiko pada fungsi administrasi pembiayaan maka sangat penting audit operasional dilakukan dengan tepat, sehingga risiko yang akan muncul dapat diminimalisir agar tidak berdampak buruk terhadap perusahaan Busri (2009). Pada pembiayaan di KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah*, Administrasi

pembiayaan memiliki tanggung jawab terhadap segala administrasi dan akuntansi pencairan sampai dengan pelunasan pembiayaan tersebut. Fungsi ini merupakan tahapan terakhir dari satu siklus proses pembiayaan. Dalam sudut audit operasional, proses dari pencairan sampai dengan pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi administrasi pembiayaan (*supporting*) ini merupakan proses yang memiliki risiko yang paling tinggi.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagian audit operasional administrasi pembiayaan dengan judul **“Implementasi Audit Operasional oleh *Internal Control* Terhadap Bagian Administrasi Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit operasional yang dilaksanakan oleh fungsi *Internal Control* pada bagian Administrasi Pembiayaan di KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah*?
2. Risiko apa yang timbul jika perusahaan gagal dalam mengendalikan risiko pada bagian pembiayaan ?
3. Bagaimana peranan *Internal Control* terhadap bagian Administrasi Pembiayaan dalam menjalankan audit operasional dapat membantu manajemen KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah* dalam mengambil keputusan terhadap kinerja staf Administrasi Pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit operasional oleh *internal control* terhadap bagian Administrasi Pembiayaan.
2. Untuk mengetahui risiko yang timbul jika perusahaan gagal dalam mengendalikan risiko pada bagian Administrasi Pembiayaan.
3. Untuk mengetahui peran *Internal Control* dapat memberikan masukan kepada pihak manajemen kinerja bagian Administrasi Pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti
 - a. Untuk memenuhi prasyarat studi pada jenjang (S1) program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 - b. Sebagai rujukan dan pertimbangan bagi penelitian masa yang akan datang, terutama penelitian yang berkaitan dengan perbankan syariah.
2. Bagi Perusahaan yang diteliti
 - a. Untuk meningkatkan informasi yang relevan dan valid kepada manajemen perusahaan
 - b. Untuk pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pembiayaan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap nasabah dan masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan keamanan data dan informasi dengan pengawasan yang ketat



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Audit

Menurut Hasanah (2018) audit adalah audit secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Menurut Agoes (2007) *Auditing* sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Menurut Konrath (2002:5) Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Whittington dkk (2012:4) Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Hayes (2014:4) Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif Mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi.

tersebut kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan 19 tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Menurut Arista dkk (2023) Audit adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan bukti sebagai informasi dalam sebuah laporan keuangan dengan melacak dan mengungkap informasi secara nyata.

Dalam berbagai pengertian tentang audit disebutkan bahwa pengendalian (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengendalian terdiri atas pemeriksaan dan tindak lanjut, penjabarannya adalah pemeriksaan akan menghasilkan temuan yang memerlukan tindak lanjut (perbaikan). Apabila tindak lanjut dilaksanakan, maka seluruh kerangka kegiatan pemeriksaan dinamakan pengendalian. Sebaliknya, jika tindak lanjut tidak dilakukan, maka seluruh kegiatan pemeriksaan hanya bersifat pengawasan. Jadi, salah satu pendekan dalam melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian adalah pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah Audit.

Menurut Naja (2007 : 6) adalah suatu proses penilaian dalam arti yang luas, secara independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan mengenai opini dan saran perbaikan.

2.1.1 Data dan fakta

Data dalam audit merupakan kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) dan dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan. Data digunakan sebagai dasar dalam proses audit untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas.

Data menurut *webster new world dictionary* adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diakui atau di anggap. Diketahui yang terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang di peroleh dari pengamatan (observasi) .

Fakta menurut Naja (2007 : 6) adalah dasar dari suatu pemeriksaan yang dalam operasional perusahaan (perbankan) disebut dokumen. Jenis dari pada data dan fakta ini sangat bergantung oleh sifat pemeriksaan yang dilakukan. Data dan fakta yang diperiksa lebih banyak bergantung pada sifat/ruang lingkup pemeriksaan, sifat/ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

- A. *Financial audit*, yaitu pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan dalam suatu periode tertentu guna memberikan perlindungan terhadap keamana harta perusahaan.
- B. *Operational audit*, yaitu pemeriksa terhadap seluruh kegiatan perbankan, baik terhadap bagian atau fungsi unit kerja maupun terhadap prosedur pekerjaan, guna evaluasi dan perbaikan rencana kerja, pencapaian tujuan organisasi, serta peningkatan manfaat atas semua sumber daya perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dalam audit operasional ada tiga hal yang menjadi tujuan:

1. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep input-proses-output. Efisiensi adalah rasio output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat membantu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2. Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program/aktivitas telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output. Sementara itu, menurut Tabety dkk (2015), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

3. Ekonomisasi

Ekonomisasi berbicara tentang cara perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap kegiatan operasinya (Mardiasmo 2002:134). Dapat disimpulkan, apakah perusahaan mampu memperoleh sumber daya yang digunakan dalam operasi dengan pengorbanan yang paling kecil sehingga harga pokok per unit input yang digunakan dalam operasi juga menjadi rendah Daeng (2007 : 6).

Managerial audit yaitu pemeriksaan terhadap keputusan, kebijaksanaan dan peraturan manajemen perusahaan dan mengevaluasi dampaknya, guna evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.2 Jenis-jenis audit

Adapun menurut Arens (2008), jenis audit dibedakan ke dalam beberapa

jenis sebagai berikut:

1. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit ini adalah untuk mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tahu apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau belum. Audit ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang ada.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri ringkasan temuan atau pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan kriteria tersebut. Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk mencari tahu apakah perusahaan/organisasi sudah menaati peraturan yang berlaku atau belum. Peraturan ini bisa menyangkut peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan/organisasi itu sendiri ataupun peraturan, ketetapan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Audit Operasional atau *Management Audit*

Audit operasional (*operational audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Tujuan audit ini adalah untuk mencari tahu apakah kegiatan operasional yang dilakukan dalam sebuah perusahaan sudah berjalan dengan efisien dan efektif atau belum. Kegiatan operasional lain yang di audit oleh audit operasional ini adalah kebijakan akuntansi.

4. Audit pemeriksaan umum atau *General Audit*

Sama seperti namanya, audit pemeriksaan umum adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Audit Pusat atau KAP yang bersifat independent pada suatu perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh sekaligus memberikan penilaian juga opini tentang kewajaran laporan keuangan.

5. Audit pemeriksaan khusus atau *Special Audit*

Lawan dari pemeriksaan umum, audit pemeriksanaan khusus hanya dilakukan sesuai permintaan dari perusahaan. Audit yang dilakukan pada pemeriksaan khusus ini juga terbatas tidak umum seperti yang dilakukan pada pemeriksaan umum. Namun walaupun seperti itu, pengerjaan tetap dilakukan oleh Kantor Audit Pusat atau KAP.

6. Audit Sistem Informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Audit sistem informasi dilakukan oleh KAP atau Kantor Akuntan Pusat yang hanya dilakukan kepada perusahaan yang data akuntansinya diproses menggunakan *System Elektronik Data Processing (EDP)*.

7. Audit Forensik

Tujuan dari pelaksanaan audit forensik adalah untuk mencegah kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi. Audit forensik biasanya juga melakukan investigasi kriminal, mencari tahu kerugian dari suatu bisnis dan mencari tahu indikasi kecurangan saat berbisnis atau karyawan.

8. Audit Investigasi

Audit ini biasa dilakukan jika disatu perusahaan terindikasi sebuah penyimpangan yang karenanya dapat merugikan keuangan pihak lain. Audit investigasi adalah audit yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengidentifikasi (*identify*), menguji (*examine*), dan juga mengenali (*reorganized*) fakta dan informasi untuk mencari pembuktian atas kejadian yang sebenarnya terjadi.

9. Audit Lingkungan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 menerangkan bahwa audit lingkungan merupakan proses manajemen yang didalamnya menyangkut evaluasi secara tercatat, obyektif, dan sistematis tentang bagaimana sebuah kinerja manajemen perusahaan atau organisasi lainnya yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kendali manajemen dalam upaya mengendalikan dampak lingkungan serta pemanfaatan peraturan Undang-undang pengelolaan lingkungan.

2.1.3 Jenis-jenis Auditor Audit

Berdasarkan Audit yang ditinjau oleh auditor atau kelompok pelaksana, Auditor ini terbagi menjadi empat macam.

a. Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah Auditor yang bekerja untuk kantor/lembaga akuntan publik yang merupakan pihak ke-3 dimana status auditor berada di luar lembaga atau perusahaan yang diaudit. Auditor eksternal bekerja secara obyektif dan bersifat independent Agoes (2007:45)

b. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja untuk perusahaan dimana ia bekerja untuk mengawasi *asset* atau *Saveguard of Asset* dan mengawasi aktifitas sehari-hari operasional perusahaan mereka Mardiosmo (2009:134)

c. Auditor Pajak

Di Indonesia, Auditor pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang tugasnya adalah melakukan ketaatan wajib pajak sesuai undang-undang yang berlaku Waluyo (2014:215)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

d. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah Auditor yang memiliki tugas untuk menilai kewajaran sebuah informasi laporan keuangan instansi pemerintahan terhadap pelaksanaan program dan juga penggunaan aset yang dimiliki pemerintah.

2.2 Audit Operasional

2.2.1 Pengertian Audit Operasional

Audit operasional merupakan audit dimana auditor akan melakukan penelaahan secara sistematis bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Umumnya pada saat selesainya audit operasional ini, auditor akan memberikan saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

Selain itu definisi operasional merupakan suatu pemeriksaan yang dimaksud sebagai penilaian terhadap cara pengelolaan suatu organisasi dan bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, pemeriksaan ditekankan pada penilaian terhadap penggunaan barang tenaga, jasa dan sebagainya ditinjau dari sudut efisiensi dan kehematan.

Menurut Hijayati (2014) Audit operasional merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Sedangkan Menurut Perdanawati dkk (2018) Audit operasional merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya ada (kriteria).

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa audit operasional merupakan tindakan pemeriksaan segala aspek dalam organisasi secara independen yaitu aspek bisnis, pengendalian keuangan dan sistem pendukung lainnya dimana aspek aspek tersebut

mempengaruhi aktifitas organisasi yang akan diperiksa secara sistematis berhubungan dengan objek-objek yang spesifik.

Kegiatan didalam audit operasional salah satunya adalah merancang dan melaksanakan prosedur – prosedur audit untuk menguji kegiatan yang akan membantu manajemen dalam menelaah secara sistematis. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan pengkajian terhadap kegiatan operasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja suatu bagian dalam perusahaan. Hasil dari audit operasional diberikan kepada manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.2.2 Tujuan Audit Operasional

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan audit operasional yang dilakukan di suatu entitas. Menurut Bayangkara (2008:3) tujuan dari audit operasional (audit manajemen) yaitu:

Audit operasional (audit manajemen) bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya akan dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut”.

Kegiatan organisasi dalam audit operasional ada 3 tujuan utama melakukan audit tersebut, mulyadi (1990:23) antara lain:

1. Menilai prestasi (kinerja) manajemen
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan
3. Membuat rekomendasi untuk memperbaiki atau tindak lanjut

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Menurut pakar auditing (2002:10), Auditing Operasional berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan bukan hanya terhadap kegiatan akuntansi saja. Untuk mencapai itu, Audit Operasional akan melaksanakan tugas-tugas Sebagai:

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik tidaknya pengendalian administrasi serta mendorong penggunaan secara efektif dan biaya yang minimum.
2. Menemukan seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
3. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen dipatuhi.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan perusahaan

Menurut Widjaja (2012:40) tujuan umum dari audit operasional adalah sebagai berikut:

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. Alat bantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien
3. Mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan, untuk membantu manajemen.
5. Auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen.
6. Membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Audit Operasional adalah memberikan informasi kepada manajemen mengenai kegiatan operasional

perusahaan, apakah sudah dilakukan secara efektif dan efisien, serta memberikan masukan mengenai bagian mana yang memerlukan perbaikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada bagian yang bersangkutan. Apabila Auditor juga dapat mengambil tindakan lebih lanjut jika hal itu diperlukan.

2.2.3 Unsur-unsur audit operasional

Menurut Arens dkk, (1997; 270), terdapat 5 (lima) unsur-unsur dalam audit operasional, yaitu antara lain:

1. Lingkungan Audit / pengendalian

Yaitu, tindakan kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, harmonis dan pemilik suatu entitas mengenai pengendalian dan arti pentingnya.

2. Penetapan resiko oleh manajemen

Yaitu, identifikasi dari analisis oleh manajemen atas risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Sistem komunikasi dan sistem akuntansi

Yaitu, metode yang dipakai dalam mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi satu entitas untuk menjamin akuntabilitas untuk aktiva yang terkait.

4. Aktifitas audit/pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan.

5. Pemantauan

Yaitu penilaian efektifitas rancangan operasi struktur audit secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

2.2.4 Jenis-jenis Audit Operasional

Menurut Arens dkk, (2006:166) membagi audit operasional menjadi tiga jenis:

1) Audit Fungsional (*Functional Audit*)

Fungsi-fungsi adalah sarana penggolongan aktifitas bisnis seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Ada banyak cara yang berlainan untuk menggolongkan dan membagi lagi fungsi-fungsi yang ada. Audit fungsional membahas satu atau lebih fungsi dalam organisasi.

Audit Organisasi (*Organizational Audit*)

Audit operasional pada organisasi membahas seluruh organisasi seperti bagian, cabang atau perusahaan anak. Audit organisasional menekankan seberapa efisiensi dan efektifnya fungsi-fungsi ini berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang sangat penting dalam audit jenis ini.

3) Penugasan Khusus (*Special Assigment*)

Dalam audit operasional, penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi audit seperti ini, contohnya mencakup penentuan penyebab tidak efektifnya sistem teknologi informasi, penyelidikan

2.2.5 Tahap-Tahap Audit Operasional

kemungkinan kecurangan dalam divisi tertentu dan pembuatan rekomendasi untuk mengurangi biaya suatu barang.

Tahap-tahap audit operasional menurut Bayangkara (2008:178-180) sebagai berikut:

1) Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan diawali dengan pengenalan antara pihak Auditor dengan *organisasi auditee*. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mengkonfirmasi *scope audit*, mendiskusikan rencana audit dan penggalan informasi umum tentang organisasi auditee, objek yang akan diaudit, mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang diterapkan pada proses produksi dan operasi.

Pada tahap ini auditor melakukan *overview* terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dijalankan, melakukan peninjauan terhadap pabrik (fasilitas produk), layout pabrik, sistem komputer yang digunakan dan berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi ini dalam mencapai tujuannya. Setelah melakukan tahapan audit ini, auditor dapat memperkirakan (menduga) kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan auditee. Hasil pengamatan pada tahapan audit ini dirumuskan ke dalam bentuk tujuan audit sementara yang akan dibahas lebih lanjut pada proses audit berikutnya.

2) Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Pada tahapan ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen

kualitas, fasilitas yang digunakan dan/atau personalia kunci dalam perusahaan, sejak hasil audit terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh pada audit pendahuluan, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama fungsi produksi dan operasi serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel ini meliputi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap program/aktivitas, praktik yang sehat, dokumentasi yang memadai dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan tersebut.

Pada tahap ini auditor juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan produksi dan operasi. Review terhadap hasil audit terdahulu juga dilakukan untuk menentukan berbagai tindakan korektif yang harus diambil. Berdasarkan review dan hasil pengujian yang dilakukan pada tahap ini, auditor mendapat keyakinan tentang dapat diperolehnya data yang cukup dan kompeten serta tidak terhambatnya akses untuk melakukan pengamatan yang lebih dalam terhadap tujuan audit sementara yang telah ditetapkan pada tahapan audit sebelumnya. Dengan menghubungkan permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan audit sementara yang dan ketersediaan dana serta akses untuk mendapatkannya. Auditor dapat menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya yang akan dialami pada audit lanjutan.

3) Audit Lanjutan (Terinci)

Pada tahap ini auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatancatatan yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit

dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan yang ditemukan auditor. Di samping itu, analisis terhadap hubungan kapabilitas potensial yang dimiliki dan utilitas kapabilitas tersebut di dalam perusahaan sangat penting dalam proses audit.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, relevan dan dapat dipercaya, auditor menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berwenang dan berkompeten berkaitan dengan masalah yang diaudit. Dalam wawancara yang dilakukan, auditor harus menyoroti keseluruhan dan ketidaksesuaian yang ditemukan dan menilai tindakan-tindakan korektif yang telah dilakukan.

4) Pelaporan

Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit (KKA), merupakan dasar dalam membuat kesimpulan dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Laporan audit disajikan dengan format sebagai berikut:

a) Informasi Latar Belakang

Menyajikan gambaran umum fungsi produksi dan operasi dari perusahaan yang diaudit, tujuan dan strategi pencapaiannya serta ketersediaan sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi strategi tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

b) Kesimpulan Audit dan Ringkasan Temuan Audit

Menyajikan kesimpulan atas hasil audit yang telah dilakukan auditor dan ringkasan temuan audit sebagai pendukung kesimpulan yang dibuat.

c) Rumusan Rekomendasi

Menyajikan rekomendasi yang diajukan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi. Rekomendasi harus didukung hasil analisis dan menjelaskan manfaat yang diperoleh jika rekomendasi ini diterapkan serta dampak negatif yang mungkin terjadi masa depan jika rekomendasi ini tidak diterapkan.

d) Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit menjelaskan tentang cakupan (luas) audit yang dilakukan, sesuai dengan penugasan yang diterima (disepakati) dengan pemberi tugas audit.

e) Tindak Lanjut

Rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan (kekurangan) yang masih terjadi pada perusahaan. Tindak lanjut (perbaikan) yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program-program perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2.2.6 Pelaksana Audit Operasional

Menurut Arens dkk (2006:499-501) mengemukakan bahwa audit operasional bisa dilaksanakan oleh:

1) Auditor Internal

Auditor internal memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan audit operasional, sehingga beberapa orang menggunakan istilah audit internal dan audit operasional saling bergantian. Akan tetapi, tidaklah tepat untuk menyimpulkan bahwa semua audit operasional dilakukan oleh auditor intern atau bahwa auditor intern hanya melakukan audit operasional. Banyak bagian audit intern melaksanakan audit operasional dan juga audit keuangan. Sering hal itu dilakukan secara bersamaan. Manfaat yang diperoleh jika auditor intern melakukan audit operasional adalah bahwa mereka mencurahkan seluruh waktunya ke perusahaan yang mereka audit. Oleh karenanya mereka mendapatkan banyak pemahaman mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya, yang mana sangat penting bagi audit operasional yang efektif

2) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan salah satu badan dalam pemerintahan yang bertugas untuk melakukan audit operasional, seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan.

3) Kantor Akuntan Publik

Latar belakang pengetahuan mengenai bisnis klien yang harus dimiliki auditor ekstern dalam melaksanakan audit seringkali memberikan informasi yang berguna dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional. Merupakan suatu yang biasa bagi klien untuk menugasi kantor akuntan publik melaksanakan audit operasional atas satu atau lebih bagian perusahaannya. Biasanya penugasan seperti itu hanya akan terjadi jika perusahaan tersebut tidak mempunyai staf audit intern atau staf audit internnya tidak mempunyai keahlian dalam bidang tertentu.

2.2.7 Kualifikasi Auditor

Menurut Arens (2006:501) dua kualitas yang terpenting bagi auditor operasional adalah independensi dan kompetensi. Berikut uraian mengenai independensi dan kompetensi:

1) Independensi

Arens dkk (2006:501) menyatakan bahwa: “Kepada siapa auditor membuat laporan adalah penting untuk memastikan bahwa investigasi dan rekomendasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dibuat tanpa bias. Independensi auditor intern diperkuat dengan memiliki bagian audit intern yang melapor ke dewan direktur atau presiden direktur”.

Kedudukan dari pemeriksa atau auditor harus terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan bebas dari pengaruh objek yang diperiksa oleh auditor dan harus dilakukan secara mandiri. Pemeriksa dikatakan mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian mereka dapat memberikan penilaian yang tidak memihak tanpa prasangka, hal ini tentu saja sangat diperlukan dalam pemeriksaan.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi harus dimiliki oleh seorang auditor. Independensi dapat memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak sehingga hasil rekomendasi yang nanti diberikan oleh auditor kepada pihak manajemen dapat dipercaya keandalannya.

2) Kompetensi

Menurut Arens dkk (2006:5) menyatakan bahwa: “Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta harus kompeten (memiliki kecakapan) agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji.”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki kompetensi karena kompetensi diperlukan untuk menentukan masalah-masalah dan membuat rekomendasi yang sesuai. Kompetensi audit operasional juga harus dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidangnya.

2.2.8 Hal-hal yang Membatasi Audit Operasional

Menurut Tunggal (2012:43) hal-hal yang membatasi audit operasional

yaitu:

- 1) Waktu
Berkaitan dengan kekomprehensifan audit tersebut.
- 2) Pengetahuan
Karena orang tidak bisa ahli dalam setiap aspek perusahaan maka auditor hanya akan sensitif terhadap masalah-masalah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki saja, dan kurang memberi perhatian pada masalah lain diluarnya.
- 3) Biaya
- 4) Data
- 5) Standar-standar
Bidang-bidang yang berada di luar standar atau kriteria keefektifan adalah di luar ruang lingkup audit operasional.
- 6) Orang
Tidak boleh menyinggung tentang ketidakmampuan seseorang dalam melakukan fungsinya, tetapi hanya menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau tugas dilaksanakan dengan tidak efektif.
- 7) Entitas audit (*audit entity*)
Pembatasan audit operasional pada suatu fungsi tertentu atau unit dalam beberapa hal yang menyampingkan aspek-aspek yang mempengaruhi audit entity tetapi aspek-aspek tersebut berada dalam cakupan atau lingkup suatu fungsi atau unit lain.

2.3 Manajemen Risiko Operasional

2.3.1 Pengertian Risiko

Istilah risiko (*risk*) pada umumnya dipahami sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Berdasarkan literatur yang ada disebutkan bahwa risiko adalah suatu hal yang bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian. Kemungkinan (*probability*) yang menyebabkan masalah tentu akan selalu berkaitan dengan risiko. Risiko menjadi suatu masalah yang krusial apabila suatu kerugian yang terjadi tidak dapat terdeteksi secara pasti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Menurut ISO 31000 risiko merupakan ketidakpastian yang berpengaruh terhadap sasaran. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dipahami lebih mendalam:

1. Sasaran (*objectives*); Sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran produksi, sasaran penjualan, dan lain-lain. Sasaran ini juga mempunyai berbagai macam bentuk dan kategori, yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan tingkat organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi harus memiliki sasaran yang jelas, agar dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dimilikinya dapat dilakukan dengan benar.
2. Ketidakpastian (*uncertainty*); yaitu adanya kekurangan (ketidakjelasan) informasi mengenai sesuatu, seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya, serta berapa besar dampaknya terhadap sasaran.
3. Dampak (*effect*); yaitu penyimpangan (*deviasi*) dari sasaran yang diharapkan. Penyimpangan disini adalah penyimpangan yang tidak hanya negatif, namun juga bisa penyimpangan yang positif, atau bahkan bisa keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara risiko dengan masalah. Risiko adalah peristiwa yang belum (mungkin) terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan dampak tersebut bisa mungkin positif dan mungkin pula negatif. Sedangkan masalah didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap sasaran. Dampak negatif ini jika tidak dapat ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan krisis bahkan bisa berubah menjadi bencana Sudarmanto (2021:2).

Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain: dikarenakan Tenggang waktu antar perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan

dalam penyusunan rencana, dan keterbatasan pengetahuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan. Risiko dapat timbul dikarenakan berbagai sebab, diantaranya adalah Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Manajemen resiko diperlukan untuk:

1. Mendukung pencapaian tujuan
2. Memungkinkan untuk melakukan aktifitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

2.3.2 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan bank. Tujuan manajemen risiko adalah, Adiwarman (2005 ; 225) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *uncontrollable*
3. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrollable*
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
5. Mengalokasi dan membatasi risiko

2.3.3 Penyebab Risiko

Dari berbagai jenis risiko yang harus dikelola oleh bank, dalam pandangan audit operasional risiko yang mendapat perhatian lebih adalah risiko operasional.

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, Adiwarman (2004 : 275) yaitu:

1. Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengalaman, perselisihan dan sebagainya.
2. Proses
3. Sumber daya.

Menurut Darmawi (2011:122) Dalam risiko operasional, risiko-risiko muncul antara lain:

1. Risiko reputasi
Risiko ini akan sangat berpengaruh terhadap manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip perbankan dan publikasi. Penyebab terjadinya penurunan reputasi antara lain kesalahan manajemen, pelanggaran peraturan dan fatwa, skandal keuangan, kurang kompeten, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, adanya keraguan akan integritas bank dan *performance* keuangan yang kurang baik
2. Risiko kepatuhan
Risiko ini lebih banyak disebabkan tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan yang ada baik internal dan eksternal seperti:
 - a. Kepatuhan Giro Wajib Minimum (GWM), *net poen position*, *Net perfoming Financing* dan batas maksimum pemberi pembiayaan
 - b. Ketentuan dalam penyediaan produk
 - c. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan
 - d. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia (BI) maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
 - e. Ketentuan perpajakan
 - f. Ketentuan dalam akad kontrak
 - g. Ketentuan dari Dewan Syariah Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



3. Risiko strategis

Risiko ini bersumber pada penetapan dan pemilihan strategi yang tidak dapat. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasi baik dalam target keuangan maupun non keuangan

4. Risiko transaksi

risiko transaksi merupakan risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini, antara lain, kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad perjanjian, kekeliruan dalam penetapan akad. Kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi serta adanya pos-pos terbuka

5. Risiko hukum

Dalam kaitan dengan risiko ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “*legal watch*” tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum
- Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
- Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam efektifitas dan *enforceability*

Menurut Darmawi (2011:100) Manajemen risiko yang efektif membantu suatu

organisasi untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait:

- Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
- Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.

2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup

- Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
- Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.

3. Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate goverment*)

4. Strategi penyesuaian risiko (*risk-adjusted*) pada saat pengambilan keputusan
5. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap
 - a. Keuntungan
 - b. Nilai saham
6. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*)
7. Memahami proses bisnis kunci
8. Sistem peringatan dini dan respons bencana yang efektif
9. keamanan informasi.

2.4 Internal control

Menurut Azhar (2008:95), *Internal Control* merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Murtin (2015) *internal control* adalah suatu konsep yang relevan pada semua sistem yang melekat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Sedangkan menurut Krismiajai (2002:218) *internal control* adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Peran *Internal control* dalam suatu perusahaan membantu manajemen dengan bertindak sebagai penasihat manajemen dalam melaksanakan fungsi.

Berdasarkan PSAK 59 tahun 2011 mengatur lebih detail mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan instrument keuangan serta termasuk pengelolaan risiko yang relevan dengan instrument tersebut. Dalam konteks pengendalian internal, perubahan ini mengharuskan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola risiko terkait instrument keuangan dan memastikan

bahwa sistem pengendalian internal tersebut mendukung kebijakan dan prosedur yang konsisten dengan standar baru ini.

2.5 Adminitrasi Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah mengutamakan jasa sebagai dasar usahanya, harus memenuhi kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Salah satu cara memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam hal ini nasabah adalah dengan memelihara administrasi yang memenuhi kaidah-kaidah pencatatan yang baik.

Sebagai lembaga yang memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, KSPPS BTM akan berhadapan dengan banyak risiko. Oleh sebab itu KSPPS BTM sebagai lembaga yang memberikan pinjaman diharapkan dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan pengendalian administrasi yang diharapkan dapat memperkecil resiko dimasa yang akan datang.

Terpeliharanya administrasi pembiayaan nasabah merupakan syarat penting dari pengendalian, hal ini dikarenakan data-data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis dan keputusan pembiayaan harus terjamin dalam ketetapan dan kelengkapannya.

Administrasi pembiayaan yang lengkap adalah dokumentasi yang mencakup seluruh informasi atau data yang penting dan relevan dimana sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan oleh pihak Lembaga keuangan KSPPS BTM maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. dalam pedoman pembiayaan Lembaga yang berbasis syariah, administrasi pembiayaan adalah berkas yang berkaitan dengan pemberi fasilitas pembiayaan yang harus disimpan dan diadministrasikan oleh

KSPPS BTM. Dalam peraturan ini mengatur tentang tata cara penyerahan, penyimpanan, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut administrasi pembiayaan.

Setelah mengetahui pentingnya administrasi pembiayaan dalam aspek dokumentasi, maka segala administrasi pembiayaan yang baik tidak akan terlaksana tanpa aparat yang mampu melakukan pekerjaan administrasi pembiayaan yang baik. Aparat atau dikenal dengan fungsi administrasi pembiayaan adalah aparat yang melakukan tugasnya dalam hal yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yaitu menyangkut pencairan, penurunan, perubahan sampai pelunasan fasilitas pemberian pembiayaan.

Fungsi administrasi pembiayaan merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan pembiayaan dan mulai proses awal pencairan sampai dengan pembiayaan tersebut lunas.

2.6 KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM)

KSPPS BTM adalah kependekan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitut Tamwil Muhammadiyah*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah. Menurut bahasa, *Baitut Tamwil* berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu *Baitul* artinya rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *Maal* atau harta. Secara keseluruhan *Baitut Tamwil* dimaknai

sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wiki Archadiwa (2020) Implementasi audit operasional oleh <i>internal control</i> terhadap bagian administrasi pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas	Deskriptif Kuantitatif	Bahwa implementasi audit operasional yang dilakukan oleh Internal Control terhadap bagian administrasi pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur satuan kerja audit intern (SKAI) yang berlaku. Proses audit dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengacu pada aturan yang berlaku.
2.	Oktapian & Fauzi (2023) Analisis penerapan pengendalian risiko pada Pembiayaan di <i>Baitul Maal Wal Tamwil</i> Rahmat Kediri	Kualitatif	Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Baitul Maal wal Tamwil Rahmat Kediri dimulai dari tahapan awal kegiatan pembiayaan pemberian pembiayaan menggunakan panduan survey prinsip 5c yang mana terdiri dari : <i>Character, capacity, Capital, Collateral, Condition of economic</i> . Dengan penerapan prinsip 5C diharapkan Baitul Maal wal Tamwil Rahmat akan memperoleh anggota-anggota yang layak dan bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan.
3	Warka Syachbrani (2019) Implementasi audit operasional dalam prinsip transparansi	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya pelaksanaan audit operasional yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Baurung Kecamatan
Banggae Timur

Maria Vanina (2024) Kualitatif
Implementasi Hasil
Audit Laporan Keuangan
dalam menunjang
efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keuangan
(Studi kasus di PT Astra
Graphia TBK
implementasi audit
operasional sistem online

sesuai dengan tahap-tahap audit operasional, maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan audit
Operasional yang terdiri dari audit pendahuluan, audit terperinci dan tindak lanjut. Kegiatan audit operasional yang berperan dalam menunjang aktivitas penjualan perusahaan dilakukan berdasarkan pedoman kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

Melina (2020) Kualitatif
Pembiayaan murabahah
di Baitul Maal Wal
Tamwil

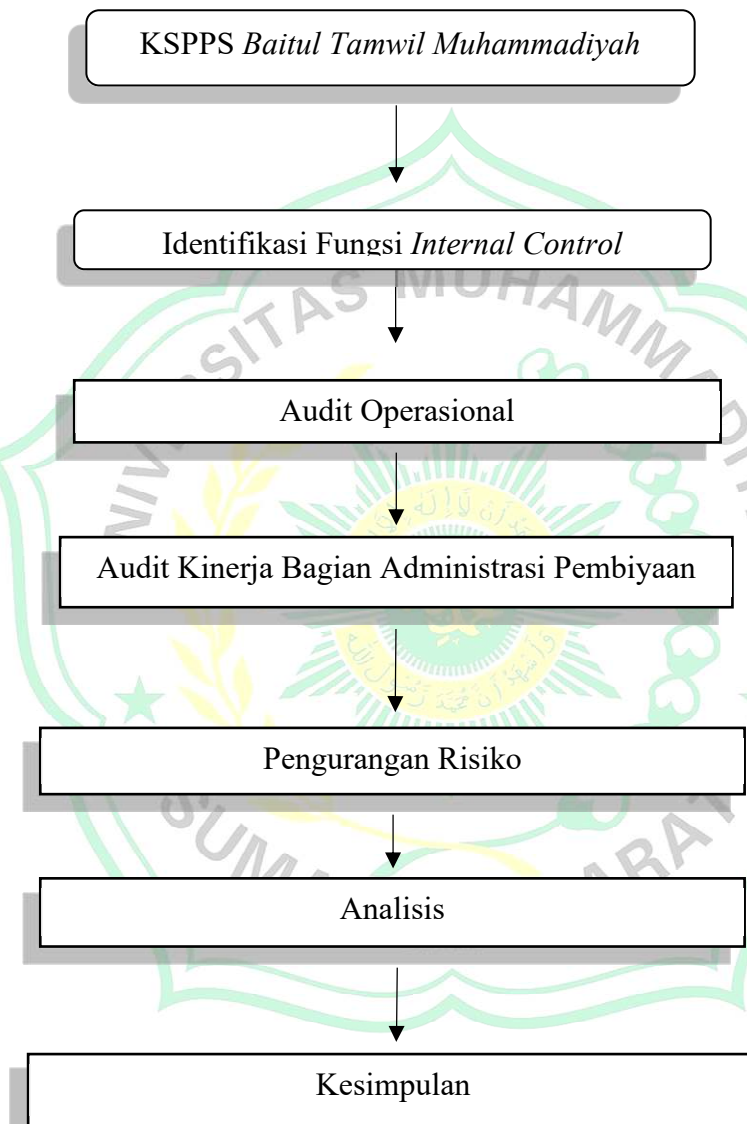
lembaga keuangan non bank berkembang dan diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu lembaga keuangan nonbank yang berkembang saat ini adalah Baitul maal wal tamwil. Dalam tulisan ini dibahas aplikasi modern murabahah dan skema pembiayaan murabahah, margin dalam murabahah serta ketentuan akad murabahah.

Ahmad Wawanda Kuantitatif
Iswanto (2023) *The role
of operational audit in
supporting sales
effectiveness* (Studi
kasus PT. Pasifik Indo
Packing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran audit operasional menunjang efektifitas penjualan pada perusahaan pt. Indo Pasifik sedang mengemas. karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana peran operasional audit nasional dan efektivitas penjualan di perusahaan adalah apakah penjualan yang telah dilakukan perusahaan sudah efektif atau sebaliknya.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) At Taqwa* Sumatera Barat. Merujuk pada latar belakang masalah maka kerangka pemikirannya adalah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran